

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Harianja & Riyadi (2023), teori keagenan menjelaskan tentang sebuah konflik mengenai kepentingan (*conflict of interest*) dan asimetri informasi antara principal dan agen. Perbedaan sebuah kepentingan, yang dimana *principal* (pemegang saham) menginginkan pengembalian yang lebih besar dan lebih cepat pergerakannya atas suatu dana atau modal yang telah di investasikan dalam sebuah perusahaan, sementara itu dalam pihak agen menginginkan suatu akomodasi melalui pemberian insentif yang cukup besar untuk penilaian kinerja mereka dalam menjalankan ataupun mengelola manajemen perusahaan. Pada hakikatnya, *agency theory* juga menyajikan gambaran, catatan, struktur, dan tanggung jawab perusahaan. Hubungan yang baik dalam ruang lingkup perusahaan akan berdampak pada pertumbuhan usaha, seperti halnya dalam mengungkapkan informasi yang relevan dan transparan kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Informasi yang relevan dan transparan tersebut juga merupakan salah satu penilaian bagi *stakeholder* untuk mengetahui kinerja perusahaan yang diproyeksikan dalam bentuk laporan keuangan.

Salah satu informasi yang relevan dan transparan selain output laporan keuangan adalah informasi terkait *green accounting* yang menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik secara materil maupun nonmateril dilingkungan masyarakat, karena jika reputasi perusahaan tersebut baik maka akan berpengaruh terhadap pasar modal yakni harga saham perusahaan (Pasaribu, 2022).

2.2 Kinerja Keuangan

Menurut (Arifani, 2016), kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut tetap diamati oleh investor. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebaga bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Para pelaku pasar sering kali menggunakan informasi tersebut sebagai tolak ukur atau pedoman dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu.

Kinerja keuangan perusahaan bagi pemegang saham sangatlah penting untuk melihat kinerja perusahaan dalam mencapai laba, membayar kewajiban, pengelolaan aset yang diinginkan dengan baik. Sehingga sangat berguna untuk menciptakan keputusan baik bagi perusahaan maupun pemegang saham (Pratiwi, 2022)

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran- ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu dengan analisis rasio keuangan, salah satunya rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2008) dalam (Nurjayanti & Amin, 2022) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

mencari keuntungan. Rasio ini juga menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Kinerja sebuah Perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio – rasio keuangan selama periode tertentu. Rasio keuangan menurut Kasmir (2019 ; 104) dalam (Polapa, 2021), antara lain:

2.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Dua rasio likuiditas yang sering digunakan adalah *current ratio* dan *quick ratio*.

2.2.2 Rasio Aktivitas

Rasio ini meilihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aset–aset tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aset–aset tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik ditanamkan pada aset lain yang lebih produktif. Rasio aktivitas yaitu rata – rata umur piutang, rasio perputaran persediaan dan perputaran aktiva tetap.

2.2.3 Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Rasio solvabilitas yaitu rasio utang (*Debt to Total Assets*).

2.2.4 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profitabilitas*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham

tertentu. Beberapa rasio profitabilitas yaitu *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM).

2.3 Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance*)

Pengukuran/indikator *green accounting* yang baik akan berdampak pada kinerja lingkungan yang baik pula. Kinerja lingkungan adalah sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan kedalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder. Kinerja lingkungan dapat dikatakan sebagai salah satu investasi bagi perusahaan untuk memperoleh kesuksesan. Jika kinerja lingkungan baik, maka profil perusahaan akan meningkat begitupun juga sebaliknya.

Lako (2018) dalam (Fahira, 2023) mengungkapkan bahwa kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk menjadikan lingkungan yang lebih baik guna untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kinerja lingkungan berpedoman pada besarnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan.

Kinerja lingkungan juga bisa diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode tertentu. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan dan yang terkait dengan aspek – aspek lingkungan. Apabila kinerja lingkungan meningkat, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih sedikit. Sebaliknya, jika semakin menurun kinerja lingkungan maka semakin bertambah kerusakan yang ditimbulkan.

Kinerja lingkungan berhubungan dengan tiga aspek yaitu :

1. Lingkungan Perusahaan Strategis (*Strategic Corporate Environmental*).
2. Pelaporan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Environmental Reporting*).
3. Kinerja Lingkungan Operasional Perusahaan (*Operational Corporate Environmental Performance*).

Kinerja lingkungan perusahaan dapat diukur melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja (PROPER) yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meningkatkan kegiatan perusahaan dalam program pengelolaan lingkungan.

PROPER digunakan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengelolaan lingkungan yang baik akan dapat meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan citra perusahaan yang nantinya juga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Secara umum peringkat kinerja PROPER dibagi menjadi 5 warna : emas, hijau, biru, merah dan hitam. Kriteria ketaatan berperingkat: biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan adalah hijau dan emas. Penilaian hijau dan emas dilakukan melalui scrining kinerja berdasarkan dokumentasi ringkasan pengelolaan lingkungan.

Aspek penilaian dalam PROPER difokuskan pada penilaian ketaatan perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kewajiban lain terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penetapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), konservasi dan pemanfaatan sumber daya, serta kegiatan sosial perusahaan.

Tabel 2. 1
Kriteria Peringkat PROPER

Kode Warna	Keterangan
Emas	Untuk usaha atau kegiatan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>evinronmental excellency</i>) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Hijau	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.
Biru	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Merah	Bagi mereka yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan .
Hitam	Diberikan kepada mereka yang dalam melakukan usaha atau kegiatannya telah dengan sengaja melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar aturan perundang – undangan yang berlaku dan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber : KLH Nomor 6 Tahun 2013

2.3.1 Faktor Kinerja Lingkungan

Kusuma (2018) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan agar melakukan manajemen lingkungan sebagai berikut :

1. *Regulatory demand*, yaitu dimana tanggungjawab lingkungan muncul pada 30 tahun terakhir, setelah masyarakat meningkatkan tekanan kepada pemerintah agar menetapkan peraturan sebagai dampak meluasnya polusi. Sistem pengawasan manajemen lingkungan menjadi dasar untuk penilaian atau skor lingkungan seperti program – program kesehatan dan keamanan lingkungan.
2. *Cost factor*, yaitu dimana terjadi komplain – komplain terhadap produk perusahaan yang akan membawa kosekuensi munculnya biaya pengawasan yang tinggi. Karena adanya semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi perlu dipersiapkan dengan baik. Kosekuensi untuk mengurangi polusi juga berdampak pada munculnya berbagai biaya seperti biaya

pengelolaan limbah, penggunaan mesin yang bersih, dan biaya kebersihan di perusahaan.

3. *Competitif requiremen*, yaitu berkembangnya pasar global dan munculnya berbagai kesepakatan perdagangan sangat berpengaruh pada munculnya gerakan standarisasi manajemen kualitas lingkungan persaingan internasional maupun nasional menurut perusahaan untuk mendapatkan jaminan dibidang kualitas. Sistem manajemen lingkungan yang komprehensif dari kombinasi lima pendekatan sebagai berikut :

- 1) Meminimalkan *waste* atau pemborosan merupakan perlindungan lingkungan yang sangat membutuhkan pencegahan terhadap aktivitas yang tidak berguna. Pencegahan polusi merupakan penggunaan material atau bahan baku proses produksi yang dapat mengurangi penyebab polusi atau sumber polusi. Tuntutan aturan untuk pengawaasan polusi semakin meningkat merupakan faktor penggerak bagi perusahaan untuk menemukan cara yang efektif dalam pencegah polusi.
- 2) *Managemen demam side*, adalah sebuah pendekatan untuk mencegah populasi yang asal mulanya digunakan industri. *Demam side industry* adalah perusahaan untuk dapat melihat dirinya dalam sudut pandang baru, sehingga dapat menemukan peluang baru.
- 3) Design lingkungan, merupakan bagian integral dari proses pencegahan polusi dan manajemen lingkungan yang proaktif. Perusahaan dihadapkan pada inefiensi dalam mendesain produk misalnya produk yang tidak dirakit kembali. Desain lingkungan diharapkan dapat mengurangi biaya *reeprocessing* dan mengembalikan produk ke pasar secara cepat dan ekonomis.
- 4) *Full cost environmental accounting*, adalah suatu konsep yang secara langsung berpengaruh pada individu, masyarakat dan lingkungan yang biasanya tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan.

2.3.2 Prinsip Kinerja Lingkungan

Sulistiwati & Dirgantari (2017) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan manajemen lingkungan dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi kinerja lingkungan proaktif. Penerapan manajemen lingkungan memerlukan keterlibatan prinsip dasar kedalam strategi perusahaan. Berikut beberapa prinsip tersebut antara lain :

1. Mengadopsi kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengeliminasi polusi berdasarkan posisi siklus hidup operasional dan mengomunikasikan kebijakan seluruh perusahaan kepada *stakeholder*.
2. Menetapkan secara objektif kriteria efektifitas program lingkungan.
3. Membandingkan kinerja lingkungan perusahaan dengan perusahaan lain yang masih dalam satu industri dengan menetapkan praktik terbaik.
4. Menetapkan budaya dalam perusahaan yang berarti kinerja lingkungan merupakan tanggungjawab seluruh karyawan.
5. Menganalisis dampak dari berbagai isu lingkungan yang berkaitan dengan permintaan terhadap produk dimasa depan terhadap produk dan persaingan industri.
6. Melakukan diskusi tentang isu – isu lingkungan, khususnya melalui rapat pimpinan.
7. Mengembangkan anggaran untuk pembiayaan lingkungan.
8. Mengidentifikasi pertanggungjawaban lingkungan.

2.4 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur hubungan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan internal dan eksternal perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Perusahaan sebaiknya menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan perlu dipertahankan, salah satunya melalui tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Terdapat banyak definisi tentang *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai proses dan suatu

struktur yang dipakai perusahaan untuk memberi nilai tambah agar keberlanjutan perusahaan bagi pemegang saham, dengan tetap memikirkan setiap kepentingan *stakeholder*, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan juga norma-norma yang berlaku.

Menurut Subiyanto & Amanah (2022) *good corporate governance* adalah susunan aturan yang digunakan untuk menentukan hubungan diantara manajer perusahaan, karyawan perusahaan, kreditor, pemegang saham, pemerintah maupun stakeholder baik internal maupun eskternal sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Penerapan dan pengelolaan *good corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.

Good Corporate Governance diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya. *Good Corporate Governance* disini diproksikan menjadi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan dewan direksi.

2.4.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sulfiani (2021) meliputi :

1. Partisipasi: Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan hukum: Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
3. Transparansi: Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
4. Daya tanggap: Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya

untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

5. Berorientasi *consensus*: Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan: Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi: Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas: Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (Pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
9. Bervisi strategis: Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*Human Development*).

2.4.2 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol serta pengawasan terhadap keputusan tersebut (Titania & Taqwa, 2023). Salah satu fungsi dari mekanisme ini dipercaya dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Variabel *good corporate governance* diukur melalui mekanisme *good corporate governance* yang merupakan sebuah syarat dalam melakukan sistem di suatu perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* diantaranya sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional

Menurut Wijaya & Agustina (2021) kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perseroan terbatas, bank, perusahaan asuransi, koperasi, yayasan, dana pensiun, reksadana dan lainnya. Menurut teori agensi semakin besar proporsi kepemilikan institusional di dalam sebuah perusahaan maka akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap agen (Jensen, 1976) pengawasan dilakukan untuk mencegah agent berperilaku menyimpang sehingga mencegah terjadinya *agency problem*. Variabel kepemilikan ini diukur dengan jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah keseluruhan saham yang beredar.

Kepemilikan institusional digunakan untuk meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Pihak kepemilikan institusional dipercaya dapat mengawasi institusi (perusahaan) secara profesional sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Dengan fungsi monitorignya, kepemilikan institusional dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Keuntungan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan yaitu dapat menganalisis informasi secara profesional sehingga informasi dapat disampaikan dengan tepat. Selain itu, dengan adanya kepemilikan institusional dapat memberikan motivasi yang besar terhadap perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan oleh investor sehingga dapat meminimalisir Tindakan kecurangan oleh manajemen untuk mementingkan kepentingan pribadi. Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin besar kekuatan suara untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisari adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan aggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Komisaris independen dipilih berdasarkan

Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat Umum Pemegang Saham). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tidak didasarkan pada jumlah suara biasanya satu orang untuk satu suara, tetapi pada jumlah saham yang dimilikinya. Komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada dewan. Oleh karena itu, fungsi komisaris Independen adalah memantau kualitas informasi kinerja direksi serta memastikan kelengkapan laporan kinerja Direksi. Dari catatan tersebut, Komisaris Independen menempati posisi yang sangat penting di perusahaan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Di dalam suatu perusahaan diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen; Pertama, acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti diatur dalam pasal 108-121 UU PT No. 40 tahun 2007; Kedua ketentuan pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasal modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar, menyesatkan, dimana komisaris pihak yang diancam oleh pasal tersebut, apabila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek, maka PT Bursa Efek Indonesia mewajibkan adanya Komisaris Independen dalam kepengurusan emiten tersebut; Ketiga adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional *Good Corporate Governance* sehubungan kehadiran Komisaris Independen yang ada di perusahaan publik yang mana pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasehat ke direksi apabila dibutuhkan. Ada 2 (dua) kriteria persyaratan seseorang menduduki jabatan komisaris independen. Kriteria atau syarat komisaris independen yaitu kriteria komisaris independen menurut *Forum for Corporate*

Governance in Indonesia (FCGI) dan kriteria komisaris independen menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004.

3. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah istilah lain menurut pemegang kekuasaan pada perusahaan. Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara kolegal. Sehingga masing – masing anggota Direksi bisa menjalankan tugas dan wewenangnya pula bisa mengambil keputusan sesuai dengan tugas utama dan fungsi masing – masing. Namun perlu di garis bawahi bahwa seluruh keputusan anggota direksi merupakan tanggung jawab bersama. Akan tetapi tetap berada pada lingkup tanggung jawab Direktur Utama yg bertugas mengkoordinasi aktivitas yang Direksi laksanakan.

Kekhawatiran pemegang saham berkaitan dengan apakah dewan direksi mampu memantau/mengendalikan manajer untuk bertindak demi kepentingan pemilik. Anggapan umum adalah bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi yang besar cenderung memiliki pengawasan yang efektif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah hal penting dalam proses pelaporan keuangan karena merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar akan semakin dikenal dan menarik perhatian publik. Perusahaan besar yang memiliki total aset yang tinggi dapat menarik investor dalam menanamkan modal di perusahaan tersebut. (Dwi & Aqamal Haq, 2023).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dilihat dari seluruh aktiva yang

dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar.

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa nilai seperti total aktiva, penjualan, modal dan laba lainnya. Nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Indikator perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Ukuran perusahaan = Ln (Total Aset)

Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semangkin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2. Ukuran perusahaan = Ln (Total Penjualan)

Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini laba akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh Penerapan *Green Accounting*, *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan *Go Public* pada Sektor Industri Makanan dan Minuman Tahun 2019- 2022.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anisa Dwi, Aqama I Haq (2023)	Pengaruh <i>Green Accounting, Good Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.	X : <i>Green Accounting, Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Kinerja Lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Biaya Lingkungan dan Komite Audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
2	Agnes Yunia Putri, Agus Satrya Wibowo, Rosel	Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting</i> Terhadap Kinerja Keuangan dengan <i>Good Corporate Governance</i>	X : <i>Green Accounting</i> Y : <i>Kinerja Keuangan</i>	Hasil pengujian diketahui bahwa <i>green accounting</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan seiring dengan <i>good</i>

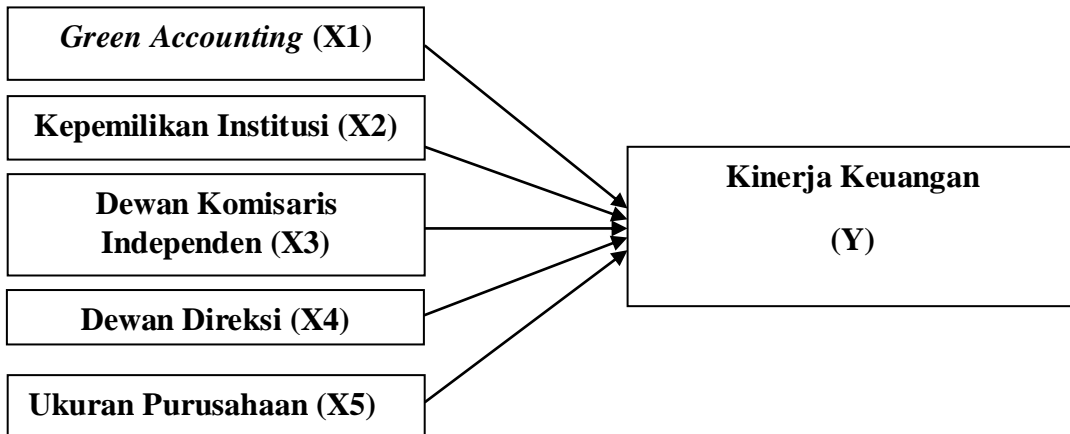
	(2022)	Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).		<i>corporate governance</i> tidak berpengaruh pula terhadap kinerja keuangan sedangkan berperan sebagai moderasi untuk memperkuat hubungan antara akuntansi hijau dengan kinerja keuangan.
3	Yesi Pratiwi (2022)	Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting, Corporate Governance</i> Dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Jasa Subsektor Properti Dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.	X : <i>Green Accounting, Good Corporate Governance</i> , Rasio Keuangan Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>green accounting</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. <i>Corporate Governance</i> dan Rasio Keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa subsektor properti dan <i>real estate</i> yang

				terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2020.
4	Nila Wati Crisyanti Harianja, Slamet Riyadi (2023)	Pengaruh <i>Green Accounting</i> dan <i>Good Corporate Governance</i>	X : <i>Green Accounting</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa <i>Green Accounting</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan <i>Green Accounting</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh tidak secara simultan terhadap Kinerja keuangan Perusahaan.

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

2.6 Kerangka Pemikiran

Dari hubungan variabel yang telah dijabarkan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan

Green accounting adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, dan menyiapkan laporan baik data lingkungan maupun finansial dengan tujuan mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Penerapan *green accounting* akan mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan, tujuan dari penerapan *green accounting* adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat.

Hasil dari penelitian replikasi oleh Dwi & Aqamal Haq (2023) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perusahaan menganggap PROPER hanya sebagai formalitas hukum untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup saja sehingga hasil dari kinerja lingkungan tidak maksimal.

Namun penelitian Pasaribu (2022) membuktikan bahwa penerapan *green*

accounting dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dimana menunjukkan hasil bahwa akuntansi lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan akuntansi lingkungan menunjukkan komitmen terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis perusahaan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kesungguhan untuk melakukan dokumentasi pencatatan biaya yang dikeluarkan dalam sistem akuntansi perusahaan untuk pengelolaan dampak lingkungan. Laporan akuntansi yang dihasilkan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen dalam mengevaluasi manfaat ekonomis (*cost dan benefit*) yang diperoleh perusahaan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Bagi masyarakat, komitmen tersebut akan berdampak pada peningkatan kepercayaan atas produk-produk yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan penjualan yang pada akhirnya akan menaikkan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian lain yang dilakukan (Chasbiandani *et al.*, 2019), (A. C. Nisa *et al.*, 2020) dan (Sulistiawati & Dirgantari, 2017).

Dari uraian diatas maka dapat dihasilkan hipotesis berikut:

H1: *Green Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Kinerja Keuangan

Proksi *Good Corporate Governance* yang pertama yaitu kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Sembiring, 2020).

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pihak-pihak berkepentingan dalam perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dalam

sebuah perusahaan dapat memberikan dorongan dalam pengawasan menjadi lebih optimal, sebab kepemilikan saham dianggap sebagai suatu hal yang mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja keuangan atau sebaliknya.

Hasil dari penelitian replikasi oleh Dwi & Aqamal Haq (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan Institusional yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, berarti setiap ada kenaikan pada kepemilikan institusional maka akan terjadi peningkatan pada nilai kinerja keuangan. Hal ini dapat terjadi karena penerapan *Good Corporate Governance* membentuk perusahaan yang kuat dan berkelanjutan.

Dari uraian diatas maka dapat dihasilkan hipotesis berikut:

H2: Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.7.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Proksi *Good Corporate Governance* selanjutnya yaitu dewan komisaris independen dikatakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena penempatan komisaris independen yang ada dalam perusahaan tidak hanya bersifat formalitas namun mereka dengan benar menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik.

Ukuran Dewan Komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan Komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dan teori agensi. Dalam suatu perusahaan Dewan Komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam *principal* dan mengontrol perilaku *opportunities* manajemen. Perusahaan yang mempunyai persentase Dewan Komisaris eksternal lebih rendah akan mempunyai pengawasan yang rendah terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, sehingga

perusahaan akan terhidar dari kesulitan keuangan (Sembiring, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian replikasi oleh Dwi & Aqamal Haq (2023) dimana menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini artinya penempatan komisaris independen yang ada dalam perusahaan tidak hanya bersifat formalitas namun mereka dengan benar menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik serta dengan semakin besar ukuran dewan komisaris independen maka akan memudahkan tugas komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen dan direksi.

Dari uraian diatas maka dapat dihasilkan hipotesis berikut:

H3: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.7.4 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Good Corporate Governance yang diproksikan dengan dewan direksi. Teori agensi menurut Jensen (1976) merupakan hubungan antara prinsipal dan agen dimana prinsipal memberikan kekuasaan atau melimpahkan wewenang kepada agen dan agen bertanggung jawab penuh dalam memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan. Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang memegang posisi penting dan memiliki kedudukan yang strategis dalam perusahaan. Dewan direksi dengan ukuran yang lebih besar, yakni dengan anggota yang lebih banyak akan menghasilkan kualitas keputusan terbaik karena adanya koordinasi antar anggota direksi sehingga akan berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Semakin tinggi jumlah anggota dewan direksi maka pengelolaan perusahaan akan semakin baik pula, yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi yang besar cenderung memiliki pengawasan yang efektif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dikatakan berpengaruh karena dengan semakin banyak anggota dewan direksi, maka perusahaan tersebut semakin banyak yang memiliki kemampuan operasional

dalam berbagai bidang dan divisi, sehingga visi, misi dan strategi perusahaan dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan (Fajri *et al.*, 2022).

Hasil dari penelitian replikasi oleh Dwi & Aqamal Haq (2023) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya pengaruh jumlah anggota dewan direksi semakin banyak anggota dewan direksi maka akan terjadi kenaikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat menunjukkan dengan semakin banyak anggota dewan direksi, maka perusahaan tersebut semakin banyak yang memiliki kemampuan operasional dalam berbagai bidang dan divisi, sehingga visi, misi dan strategi perusahaan dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Dari uraian diatas maka dapat dihasilkan hipotesis berikut:

H4: Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
2.7.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas serta memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan investasi. Perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat, karena itu perusahaan akan lebih hati-hati dalam melakukan pelaporan, sehingga perusahaan menjaga kinerja keuangan mereka. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar aset yang dimiliki suatu perusahaan. Aset tersebut mencerminkan hak & kewajiban serta modal perusahaan.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan menunjukkan semakin banyak jumlah total aset yang dimiliki, yang berarti semakin tinggi tingkat kemampuan perusahaan mengelola asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba. Tingginya tingkat laba yang dihasilkan disertai pengelolaan aset yang efisien maka akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin efisien kinerja keuangan perusahaan. dan (Diana *et al.* 2020).

Hasil dari penelitian replikasi oleh Dwi & Aqamal Haq (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti apabila ukuran perusahaan meningkat akan diikuti meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi bagaimana kemampuan perusahaan dalam menangani risiko yang mungkin akan terjadi dari berbagai kondisi yang sewaktu-waktu akan dihadapi.

Hasil penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Injayanti *et al.* (2023) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan besar dianggap sebagai indikator yang menggambarkan tingkat risiko bagi investasi pada perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut mampu memenuhi segala kewajibannya serta memberikan tingkat pengembalian yang memadai bagi investor sehingga karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin besar pula kesempatan perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang digunakan untuk melakukan perluasan usaha yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Dari uraian diatas maka dapat dihasilkan hipotesis berikut:

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan